



ပိတၢ်ၵိၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်း
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ၵိၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်း
DINAS PERHUBUNGAN

ၵိၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်း
 JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA I NOMOR 1 DENPASAR-BALI (80235),
 ၵိၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်းၵုၵ်း

Telepon (0361) 224436, 227730 Laman : dishub.baliprov.go.id Pos-el : dishub@baliprov.go.id

Bali, 2 Februari 2024

Yth. Badan Perencanaan
 Pembangunan Daerah
 Provinsi Bali
 di
 Denpasar

SURAT PENGANTAR
NOMOR : B.34.045.2/654/SEKRET/DISHUB

No.	Naskah Dinas/Barang Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Dinas Perhubungan Tahun 2023	1 (satu) Gabung	Dengan hormat dikirim untuk dapat dipergunakan sebagaimana mstinya

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 Dr.Ir.I Gde Wayan Samsi Gunarta M.Appl.,Sc
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19650807 199603 1 002



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan, dimana dalam penyelenggaraannya banyak elemen yang terkait seperti sarana, prasarana, pergerakan, sertifikasi, kelaikan, perambuan, kenavigasian, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan begitu saja. Jaringan transportasi sebagai akses keluar-masuk barang dan jasa dari Bali ke kota-kota nasional maupun Internasional dapat dicapai melalui Pelabuhan Penyeberangan, Bandar Udara Internasional, serta simpul-simpul transportasi keluar-masuk Bali tersebut ke seluruh pelosok wilayah Provinsi Bali telah dihubungkan dengan prasarana jaringan jalan dan atau prasarana pelabuhan / lapangan terbang kecil lainnya, artinya untuk mencapai seluruh pelosok wilayah Provinsi Bali telah tersedia jaringan transportasi secara langsung dan atau transportasi terusan. Pembangunan transportasi, informasi dan komunikasi perlu terus dimantapkan dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan kualitas pelayanan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas barang dan jasa agar mampu menunjang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah dan stabilitas nasional.

Keputusan Kepala Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 bahwa transportasi merupakan penunjang urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan masyarakat berbangsa dan bernegara mempunyai peranan strategis untuk menunjang pembangunan daerah, sekaligus sebagai sarana pemersatu Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia; untuk menunjang kelancaran, keselamatan dan keamanan pelayanan jasa transportasi yang strategis, terpadu, efektif dan efisien, dalam menggerakkan dinamika pembangunan, pola distribusi serta hubungan Nasional dan Internasional yang dinamis sesuai aspirasi daerah, yang mana akan dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan.

Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bali adalah Terwujudnya Transportasi yang Handal, dimana untuk mewujudkan tujuan tersebut didukung dengan Sasaran strategis tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Sistem Transportasi yang berkelanjutan;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



- b. Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai;
- c. Terwujudnya Transportasi yang lancar
- d. Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan serta pertanggungjawabannya maka Dinas Perhubungan Provinsi Bali diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2023.

Adapun dasar dalam Penyusunan LKJIP 2023 sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.

2. KONDISI ORGANISASI

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

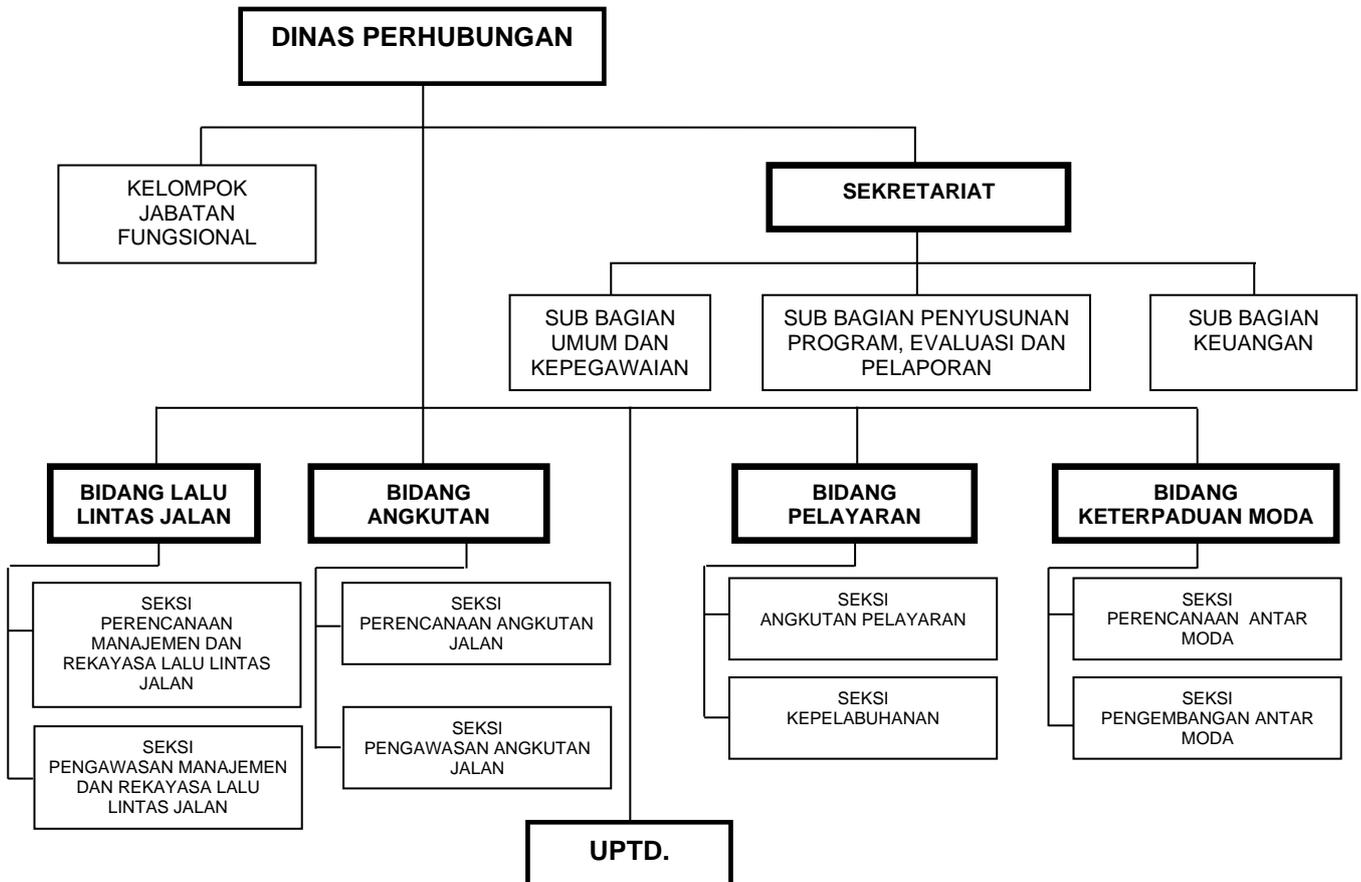


Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

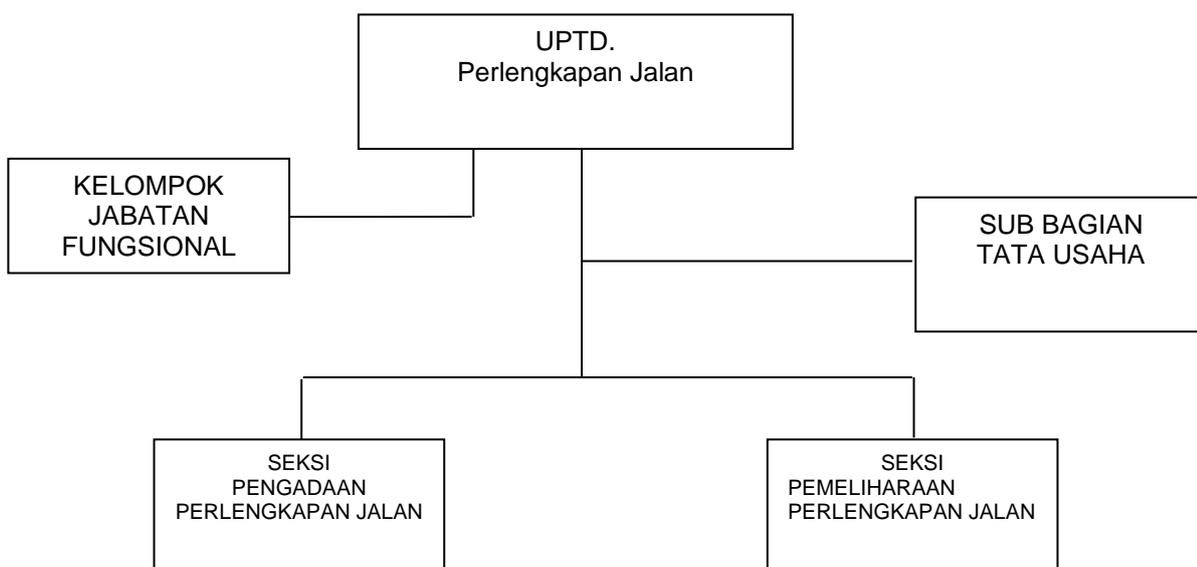
- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 2. Seksi Pengawasan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 - c. Bidang Angkutan Jalan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Angkutan Jalan;
 2. Seksi Pengawasan Angkutan Jalan;
 - d. Bidang Pelayaran, membawahi :
 1. Seksi Angkutan Pelayaran;
 2. Seksi Kepelabuhanan;
 - e. Bidang Keterpaduan Moda, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Antar Moda;
 2. Seksi Pengembangan Antar Moda;
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Struktur Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



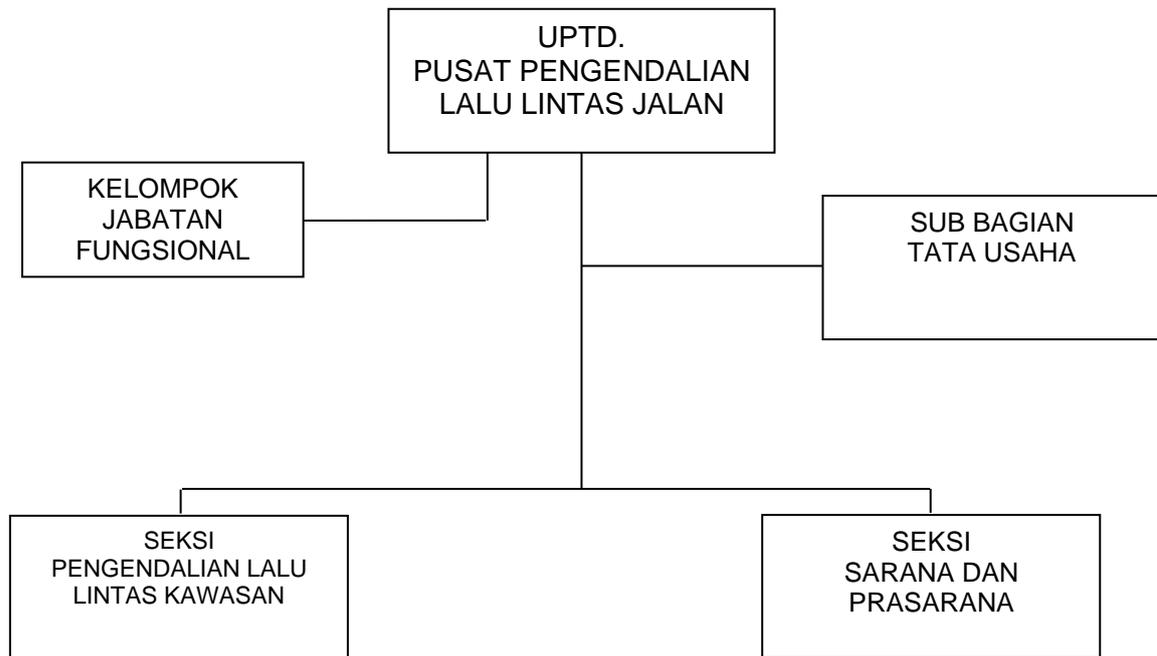
Secara lengkap diuraikan dalam struktur organisasi sebagai berikut :



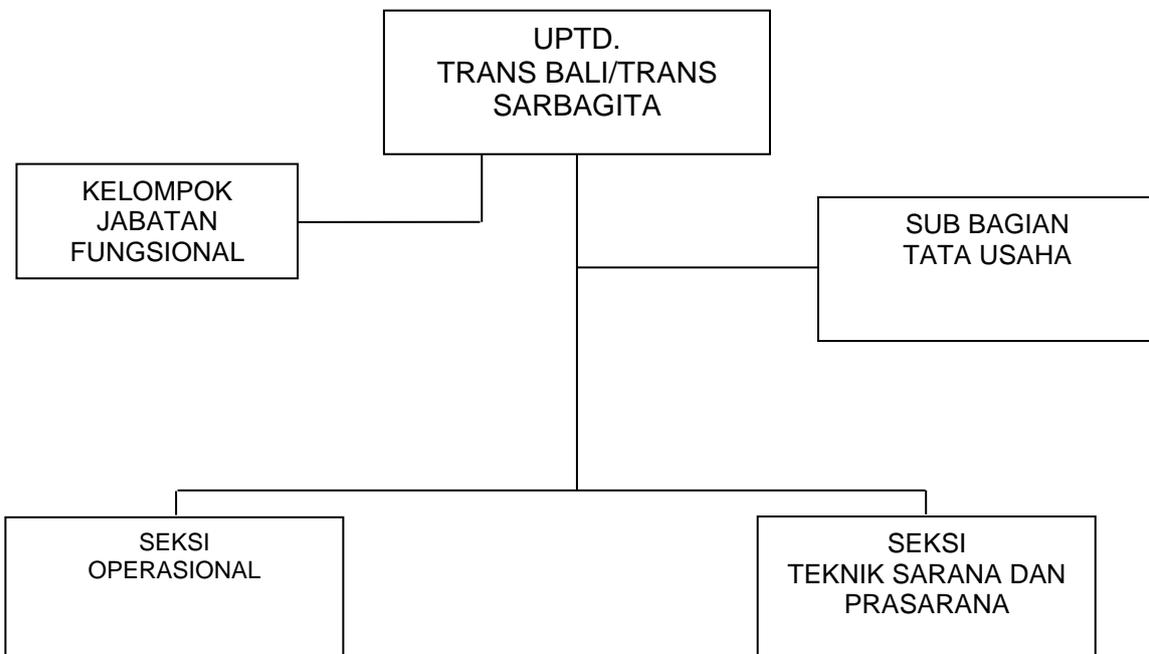
A. UPTD. PERLENGKAPAN JALAN



B. UPTD. PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN



C. UPTD. TRANS SARBAGITA



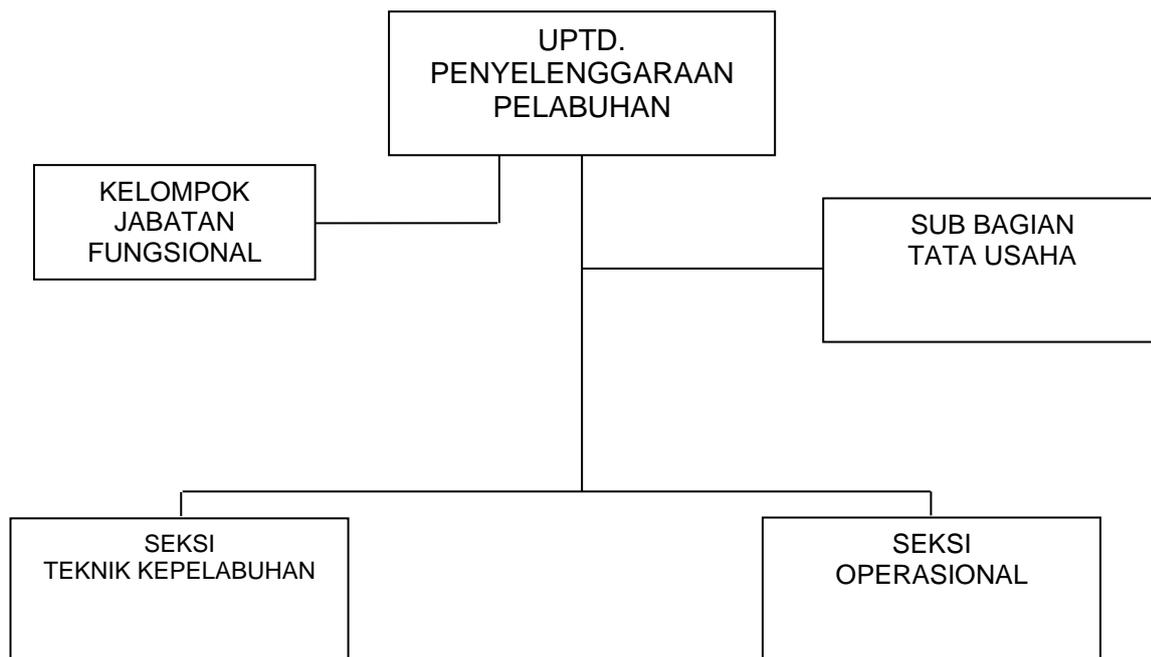
D. UPTD. PENYELENGGARA PELABUHAN



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Rincian Tugas Pokok Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang perhubungan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Isu Strategis (STRATEGIC ISSUED)



- a. Terjadinya Kemacetan lalu lintas terutama di daerah Kawasan Sarbagita dan Pusat-pusat kegiatan wisata
- b. Tingginya kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia di Provinsi Bali,
- c. Masih rendahnya penggunaan angkutan umum,
- d. Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (Bandara, Pelabuhan, Jalan, dan Terminal);
- e. Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.

BAB II

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS 2019 – 2023

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses usaha untuk mencapai tujuan dengan menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran, dengan demikian dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan), sehingga strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran tahunan yang ditetapkan melalui program kegiatan dapat diantisipasi secara realistis sesuai potensi yang dimiliki, termasuk hambatan, peluang dan tantangan yang mungkin perlu dihadapi dimasa depan.

Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berimplikasi juga terhadap regulasi dan kebijakan di daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta, peningkatan daya saing daerah serta melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraannya dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pusat dengan daerah dan antar daerah serta peluang dan tantangan dalam persaingan global.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada akhirnya hal ini berimplikasi terhadap kebijakan pada perangkat daerah (PD) agar segera menindaklanjuti dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan beserta turunannya.

Berpedoman pada Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan terpilih dan dilantiknya Gubernur Bali periode 2018 – 2023, memperhatikan transisi regulasi dan relevansi ketentuan yang berlaku serta perubahan kebijakan yang mendasar menjadikan *entry point* telah disusun dan ditetapkan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023 dengan Perda No. 3 tahun 2019. Dengan telah ditetapkannya RPJMD 2018 -2023 sesuai mekanisme yang berlaku, evaluasi terhadap dokumen perencanaan strategis pada perangkat daerah juga terus berproses menuju kearah yang lebih baik.

VISI DAN MISI



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Memperhatikan posisi dan kondisi geografis, potensi lingkungan internal dan eksternal maupun perkembangan tatanan kehidupan masyarakat lokal, nasional maupun global, maka guna menunjang pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan hidup sehingga peran serta sektor transportasi sangat penting sebagai penggerak untuk dinamika pembangunan, mendukung mobilitas barang dan jasa serta pola distribusi nasional.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bali 2018 - 2023 yaitu “ **Nangun Sat Kerthi Loka Bali** ”, dengan 3 (tiga) utama yaitu Alam Bali, Krama Bali (Manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali. Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *krama* dan *gumi* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Dalam mempercepat pencapaian Visi diatas, juga dijabarkan kedalam Misi yang mengidentifikasi cara – cara untuk mewujudkan Misi. Dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018 – 2023 terdapat 22 Misi yang didelegasikan kepada OPD sesuai Tupoksi.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018 - 2023 mengacu pada **Misi Ke-18 ”Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat, Laut Dan Udara) Secara Terintegrasi Serta Konektivitas Antar Wilayah Untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses Dan Mutu Pelayanan Publik Di Bali”**. Untuk mewujudkan Misi tersebut diatas Dinas Perhubungan Provinsi Bali menuangkannya kedalam bentuk Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tujuan “ Terwujudnya Transportasi yang Handal ”

Sasaran : Terwujudnya Sistem Transportasi yang berkelanjutan

Sasaran : Terwujudnya Transportasi yang Lancar

Sasaran : Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan

Sasaran : Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja

Pencapaian Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) apabila dalam penyelenggaraan transportasi berjalan dengan baik serta terjadi interaksi antara pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Bali sebagai **regulator** dan masyarakat sebagai



pengguna jasa transportasi, maka untuk mentaati tata laksana pemanfaatan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing akan dapat meminimalisasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana transportasi.

Dengan demikian, misi tersebut secara jelas akan terlihat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

2. PERJANJIAN KINERJA 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 untuk Dinas Perhubungan Provinsi Bali, sebagai berikut :

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Sistem Transportasi yang berkelanjutan	Persentase lintasan keretaapi wilayah Sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	50
Terwujudnya Transportasi yang Lancar	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan nasional	65
	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	72,51%
	Rasio konektivitas layanan angkutan	0,84
	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	79
Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan	50
Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84

BAB III

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023:

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2023 dapat dicapai dari target kinerja dan realisasi fisik di masing-masing Indikator Kinerja Sasaran. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran berdasarkan pelaksanaan Program/Kegiatan tahun anggaran 2023, dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	50
2	Terwujudnya transportasi yang lancar	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	65%
		Rasio konektivitas layanan angkutan	0,84
		Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50%
		Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	79
3	Terwujudnya transportasi yang berkeselamatan	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	72,51
4	Terwujudnya akuntabilitas capaian kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2. Perbandingan Realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2023

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target di tahun 2023 dapat digambarkan sesuai dengan tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023
1	Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	50	50
2	Terwujudnya transportasi yang lancar	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	65%	65%
		Rasio konektivitas layanan angkutan	0,84	0,84
		Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50%	50%
		Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	79	79
3	Terwujudnya transportasi yang berkeselamatan	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	72,51	72,51
4	Terwujudnya akuntabilitas capaian kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	84

B. ANALISIS

Analisis dan evaluasi capaian Kinerja Sasaran tahun 2023 dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1. Sasaran Pertama “Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai”

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN		REALISASI
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2023		PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	50	50	Program : Pengelolaan Perkeretaapian	Kegiatan : Penetapan Recana Induk Perkeretaapian	100%

Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran



Indikator Kinerja Sasaran Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian yang diampu oleh Bidang Keterpaduan Moda yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dengan mewujudkan Infrastruktur Perhubungan yang memadai. Adapun kegiatan pendukungnya sebagai berikut :

- Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian pada Provinsi Bali. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp252.894.476,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.245.432.552,00 (97,05%), serta realisasi fisik (100%).

Penjelasan dalam perumusan perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Bali “Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan” sebagai berikut:

$$\frac{\text{Lintasan keretaapi wilayah Sarbagita yang mendapatkan komitmen pembiayaan}}{\text{Lintasan wilayah Sarbagita}} \times 100\%$$

1.2. Sasaran Kedua “Terwujudnya Transportasi yang lancar”

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN		REALISASI
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2023		PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Transportasi yang lancar	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	65%	65%	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kegiatan : (1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, (2) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi, (3) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	100%
	Rasio konektivitas layanan angkutan	0,84	0,84	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kegiatan : Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%
	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50%	50%	Program : Pengelolaan Pelayaran	Kegiatan : Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) dan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100%
	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	79	79	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%

Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran



(1.2) tahun 2023 ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional

Program Penyelenggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diampu oleh UPTD dan Bidang yang terdiri dari UPTD. Perlengkapan Jalan, UPTD. Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam upaya memenuhi persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional dengan mewujudkan transportasi yang lancar melalui pengawasan, koordinasi, penataan dan pemeliharaan. Adapun kegiatan pendukungnya sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk menyediakan dan memelihara perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Bali, agar perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Bali dapat terehabilitasi dan terpelihara. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp1.780.802.336,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.603.703.428,00 (90,06%), serta realisasi fisik (100%).
- Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk pelaksanaan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan di Jalan Provinsi Bali, agar meningkatkan kelancaran pengguna jaringan jalan. Pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp2.191.562.076,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.696.795.216,00 (77,42%), serta realisasi fisik (100%).

Target Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi Bali yang berbasis ATCS dijabarkan dengan pedoman sebagai berikut:

- 1) Sesuai PM Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas disebutkan Karakteristik Tingkat Pelayanan pada Persimpangan tertuang pada tabel sbb:

Karakteristik Tingkat Pelayanan pada Persimpangan

Tingkat Pelayanan	Tundaan (Delay) (det/kend)
A	≤ 5,0
B	5,1 – 15
C	15,1 – 25



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Tingkat Pelayanan	Tundaan (Delay) (det/kend)
D	25,1 – 40
E	40,1 – 60
F	≥ 60

- **Tingkat Pelayanan A** : pergerakan yang lancar/sangat baik dan sebagian besar kendaraan tiba pada saat lampu hijau.
 - **Tingkat Pelayanan B** : pergerakan baik, kendaraan yang berhenti pada tingkat ini lebih banyak dari kendaraan pada LOS A.
 - **Tingkat Pelayanan C** : pergerakan yang kurang baik dan atau waktu siklus yang lebih panjang. Jumlah kendaraan yang berhenti sangat berpengaruh pada tingkat ini walaupun masih banyak kendaraan yang melewati persimpangan ini.
 - **Tingkat Pelayanan D** : pergerakan yang buruk dan pengaruh kemacetan lebih terlihat pada tingkat ini. Akibat dari waktu siklus yang panjang atau rasio kendaraan yang tinggi dan rasio kendaraan henti menurun.
 - **Tingkat Pelayanan E** : pergerakan yang buruk akibat dari nilai tundaan yang tinggi, biasanya menunjukkan nilai waktu siklus yang panjang dan rasio kendaraan yang tinggi.
 - **Tingkat Pelayanan F** : kondisi macet total atau ketika arus kedatangan melebihi kapasitas dari persimpangan tersebut.
- 2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- 1) Menurut pasal 93 ayat 1 menyebutkan bahwa :
- a) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 1. Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 2. Pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 3. Pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;



4. Pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
5. Pemaduan berbagai moda angkutan;
6. Pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
7. Pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
8. Perlindungan terhadap lingkungan.
9. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
 1. Perencanaan;
 2. Pengaturan;
 3. Perekayasa;
 4. Pemberdayaan; dan
 5. Pengawasan.

Adapun data penunjang dalam perhitungan lalu lintas harian rata-rata pada jaringan jalan Provinsi Bali Tahun 2023 mengetahui karakteristik pada jalan Provinsi yang telah disebutkan diatas sesuai pedoman PM Nomor 96 Tahun 2015.

Rekapitulasi Perhitungan Lalu lintas Harian Rata-rata Pada Jaringan Jalan Provinsi Tahun 2023

I. NEGERA										
NO	NO. RUAS				NAMA RUAS	PANJANG (KM)	TAHUN 2023			
							VOLUME (SMP/JAM)	KAPASITAS (SMP/JAM)	V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN
1	0	0	2	12K	JLN.DR.SUTOMO - GATOT SUBROTO (NEGERA)	0,78	760	3164,89	0,24	B
2	0	0	3	12K	JLN. NGURAH RAI (NEGERA)	2,01	876	5896,28	0,15	A
3	0	7	5		BTS. KOTA NEGARA - PENGAMBENGAN	3,97	1136	1946,49	0,58	C
4	0	7	5	11k	JLN. DANAU BUYAN - BTS.KOTA NEGARA	2,75	649	2426,14	0,27	B
5	0	7	6		SIMP. RAMBUTSIWI - PURA RAMBUTSIWI	0,79	126	2792,79	0,05	A
6	0	8	7		PENGAMBENGAN - CUPEL - BANYUBIRU	6,30	898	2736,37	0,33	B

II. TABANAN										
NO	NO. RUAS				NAMA RUAS	PANJANG (KM)	TAHUN 2023			
							VOLUME (SMP/JAM)	KAPASITAS (SMP/JAM)	V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN
1	0	0	5	12k	JLN. GAJAH MADA - P. MENJANGAN - P. BATAM (TABANAN)	2,00	1447	3032,68	0,48	C
2	0	0	5	13K	JLN. P. SERIBU (TABANAN)	0,30	714	2881,14	0,25	B
3	0	0	6	12K	JLN. GAJAH MADA (TABANAN)	0,47	1621	2445,62	0,66	C
4	0	0	6	13K	JLN. PAHLAWAN - G.SEMERU (TABANAN)	1,09	2071	3129,72	0,66	C
5	0	0	6	14K	JLN. GATOT SUBROTO (TABANAN)	1,15	1958	2883,56	0,68	C
6	0	0	6	15K	JLN. NGURAH RAI (TABANAN)	0,97	1936	3129,72	0,62	C
7	0	5	8		BTS.KEDIRI - TANAH LOT	7,54	2072	3300,88	0,63	C
8	0	5	8	11K	JLN. HUSNI THAMRIN (TABANAN)	0,52	749	2454,30	0,31	B
9	0	5	8	12K	JLN. IMAM BONJOL (TABANAN)	0,66	2373	2859,03	0,83	D
10	0	5	8	13K	JLN. TEUKU UMAR - BTS.KEDIRI	0,93	1945	2507,92	0,78	D
11	0	5	8	14K	JLN. WAGIMIN KEDIRI (TABANAN)	0,70	553	2539,92	0,22	B
12	0	7	3		BTS. KEDIRI - BELAYU - MENGWI	4,06	1534	1946,49	0,79	D
13	0	7	3	11k	JLN. KAPTEN TENDEAN (TABANAN)	1,70	977	1404,44	0,70	C
14	0	7	3	12K	JLN. RAYA ALAS KEDATON - BTS. KEDIRI	0,50	855	1450,23	0,59	C
15	0	7	7	11K	JLN. GUNUNG BATUR (TABANAN)	0,09	614	2445,62	0,25	B
16	0	7	7	12K	JLN. GUNUNG AGUNG (TABANAN)	1,51	1129	2110,74	0,53	C
17	0	8	9		SP.PETANG - BATUNYA	10,97	369	2049,3	0,18	A
18	0	9	1		SP. KEROBOKAN - MUNGGU - TANAH LOT	9,80	3226	2567,11	1,26	F



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



III. DENPASAR											
NO	NO. RUAS					NAMA RUAS	PANJANG (KM)	TAHUN 2023			
								VOLUME (SMP/JAM)	KAPASITAS (SMP/JAM)	V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN
1	0	5	9	11K		JLN. RAYA PUPUTAN NITIMANDALA (DPS)	3,34	3475	3681,45	0,94	E
2	0	5	9	12K		JLN. COK AGUNG TRESNA NITIMANDALA (DPS)	2,15	3840	3930,85	0,98	E
3	0	5	9	13K		JLN. BASUKI RAHMAT NITIMANDALA (DPS)	0,35				
						Arah : Timur - Barat		322	2739,69	0,12	A
						Arah : Barat - Timur		426	2739,69	0,16	A
4	0	5	9	14K		JLN. DR. MUARDI NITIMANDALA (DPS)	0,28	834	2753,26	0,30	B
5	0	5	9	15K		JLN. TANTULAR NITIMANDALA (DPS)	0,63	1981	2952,26	0,67	C
6	0	5	9	16K		JLN. D.I. PANJAITAN NITIMANDALA (DPS)	0,63	853	2229,32	0,38	B
7	0	5	9	17K		JLN. KUSUMAATMAJA NITIMANDALA (DPS)	0,64	2205	3516,54	0,63	C
8	0	5	9	18K		JLN. IR. JUANDA NITIMANDALA (DPS)	0,64	1404	3305,28	0,42	B
9	0	5	9	19K		JLN. PROF. MOCH. YAMIN NITIMANDALA (DPS)	0,80	3753	4198,87	0,89	E
10	0	5	9	1AK		JLN. CUT NYAK DIEN NITIMANDALA (DPS)	0,20	985	2347,90	0,42	B
11	0	5	9	1BK		JLN. S. PARMAN NITIMANDALA (DPS)	0,21	1137	2347,90	0,48	C
12	0	5	9	1CK		JLN. TANTULAR BARAT NITIMANDALA (DPS)	0,72	671	3516,54	0,19	A

IV. BADUNG											
NO	NO. RUAS					NAMA RUAS	PANJANG (KM)	TAHUN 2023			
								VOLUME (SMP/JAM)	KAPASITAS (SMP/JAM)	V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN
1	0	6	3	1		BTS. KOTA DENPASAR - SP. PETANG	27,72	2528	2567,11	0,98	E
2	0	6	8			MAMBAL - KENGETAN	3,40	2756	2482,48	1,11	F
3	0	8	9			SP.PETANG - BATUNYA	10,97	369	2049,3	0,18	A
4	0	9	1			SP. KEROBOKAN - MUNGGU - TANAH LOT	9,80	3226	2567,11	1,26	F

V. KLUNGKUNG											
NO	NO. RUAS					NAMA RUAS	PANJANG (KM)	TAHUN 2023			
								VOLUME (SMP/JAM)	KAPASITAS (SMP/JAM)	V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN
1	0	4	1	11K		JALAN NGURAH RAI (SEMARAPURA)	1,34	880	2648,11	0,33	B
2	0	5	5	11K		JLN. PUPUTAN - BTS. KOTA SEMARAPURA	1,09	1274	2244,60	0,57	C
3	0	5	6	11K		JLN. KECUBUNG (SEMARAPURA)	0,86				
						Arah : Denpasar - Semarapura		402	2513,81	0,16	A
						Arah : Semarapura - Denpasar		464	2513,81	0,18	A
4	0	5	6	12K		JLN. RAMA (SEMARAPURA)	1,50	740	3164,63	0,23	B

VIII. GIANYAR											
NO	NO. RUAS					NAMA RUAS	PANJANG (KM)	TAHUN 2023			
								VOLUME (SMP/JAM)	KAPASITAS (SMP/JAM)	V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN
1	0	6	8			MAMBAL - KENGETAN	3,40	2756	2482,48	1,11	F
2	0	4	3			SEMEBAUNG - BEDAHULU	2,03	2132	2482,48	0,86	E
3	0	6	0			BLAHBATUH - BONE - BTS. KOTA GIANYAR	3,96	2176	2482,48	0,88	E
4	0	6	0	11K		JLN. ASTINA SELATAN (GIANYAR)	0,65	1120	2110,74	0,53	C
5	0	6	0	12K		JLN. KESATRIAN (GIANYAR)	0,80	809	2110,74	0,38	B
6	0	6	4			TEGALTAMU - KEDEWATAN	14,35	2650	2482,48	1,07	F
7	0	6	5			KEDEWATAN - UBUD	2,90	1586	2567,11	0,62	C
8	0	6	6			KEDEWATAN - PAYANGAN - BATURANYAR	30,66	1869	1821,60	1,03	F
9	0	9	0			BURUAN - GIANYAR	2,73				
						Arah : Buruan - Gianyar		852	3168,00	0,27	B
						Arah : Gianyar - Buruan		825	3168,00	0,26	B
10	0	9	2			KETEWEL - SUKAWATI	4,02	2177	2482,48	0,88	E

IX. BANGLI											
NO	NO. RUAS					NAMA RUAS	PANJANG (KM)	TAHUN 2023			
								VOLUME (SMP/JAM)	KAPASITAS (SMP/JAM)	V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN
1	0	4	4	11K		JLN. MERDEKA (BANGLI)	3,50	1260	2765,80	0,46	C
2	0	4	6	11K		JLN. NUSANTARA (BANGLI)	1,71	985	2426,14	0,41	B
3	0	4	7	11K		JLN. KUSUMAYUDA (BANGLI)	1,27	679	2426,14	0,28	B



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Perhitungan Tingkat Pelayanan Ruas Jalan

$$\text{Derajat Kejenuhan (DS)} = V/C$$

Ket :
 V = volume lalu lintas (smp/jam)
 C = Kapasitas jalan (smp/jam)
 smp = satuan mobil penumpang

Sesuai data pada tabel tersebut diatas, ruas jalan provinsi yang telah dihitung tingkat pelayanannya. Bila dirata – ratakan maka pencapaian kinerja ruas jalan sesuai tabel diatas masuk kategori C atau sesuai target dimana keadaan jalan arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan.

- Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali guna mengendalikan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan di sekitar jalan Provinsi, semakin berkembangnya pembangunan baik pembangunan infrastruktur kawasan perumahan, pusat perbelanjaan (mall), pertokoan dan perhotelan. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp19.883.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp11.965.610,00 (60,18%), serta realisasi fisik (100%).

Penjelasan dalam perumusan perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Bali “Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional” sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah akses KSP yang mencapai waktu tempuh 2,5 jam/100km menuju jalan nasional}}{\text{Jumlah KSP}} \times 100\%$$

Dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengacu pada Perda No.3 tahun 2020 tentang RTRWP Bali Tahun 2009-2029 Pasal 1 ketentuan no. 22 menyebutkan bahwa Rencana umum tata ruang adalah rencana tata ruang yang dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan, secara hierarki terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota, berikut data Kawasan Strategis Provinsi sesuai Perda No.3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029



Kawasan Strategis Provinsi

No	Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Ket
1	Kawasan Niti Mandala dan Sekitarnya di Kota Denpasar.	KSP dalam bentuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi
2	KSPD Candikusuma di Kabupaten Jembrana	KSP dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)
3	KSPD Perancak di Kabupaten Jembrana	
4	KSPD Soka di Kabupaten Tabanan	
5	KSPD Tanah Lot di Kabupaten Tabanan	
6	KSPD Cangu di Kabupaten Badung	
7	KSPD Kuta di Kabupaten Badung	
8	KSPD Nusa Dua di Kabupaten Badung	
9	KSPD Sanur di Kota Denpasar	
10	KSPD Lebih di Kabupaten Gianyar	
11	KSPD Ubud di Kabupaten Gianyar	
12	KSPD Tegal Besar–Goa Lawah di Kabupaten Klungkung	
13	KSPD Nusa Penida di Kabupaten Klungkung	
14	KSPD Candidasa di Kabupaten Karangasem	
15	KSPD Ujung di Kabupaten Karangasem	
16	KSPD Tulamben di Kabupaten Karangasem	
17	KSPD Air Sanih di Kabupaten Buleleng	
18	KSPD Kalibukbuk di Kabupaten Buleleng	
19	KSPD Batuampar di Kabupaten Buleleng	
20	KSPDK Gilimanuk di Kabupaten Jembrana	
21	KSPDK Palasari di Kabupaten Jembrana	
22	KSPDK Bedugul–Pancasari di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng	
23	KSPDK Kintamani di Kabupaten Bangli	KSP Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah (KPTD)
24	Kawasan Pengembangan dan Sekitarnya di Kabupaten Jembrana	
25	Kawasan Pekutatan dan sekitarnya di Kabupaten Jembrana	
26	Kawasan Mengwi dan Sekitarnya di Kabupaten Badung	
27	Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dan Sekitarnya di Kabupaten Klungkung	
28	Kawasan Kubutambahan dan Sekitarnya di Kabupaten Buleleng	
29	Kawasan Celukan Bawang dan Sekitarnya di Kabupaten Buleleng	
30	Kawasan Tempat Suci Pura Batukaru di Kabupaten Tabanan	KSP Kawasan Tempat Suci dan Pura Sad Kayangan
31	Kawasan Tempat Suci Pura Luwur Uluwatu di Kabupaten Badung	
32	Kawasan Tempat Suci Pura Puncak Mangu di Kabupaten Badung	
33	Kawasan Tempat Suci Pura Pusering Jagat di Kabupaten	



No	Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Ket
	Gianyar	
34	Kawasan Tempat Suci Pura Ketel Bumi di Kabupaten Klungkung	
35	Kawasan Tempat Suci Pura Goa Lawah di Kabupaten Klungkung	
36	Kawasan Tempat Suci Pura Batur di Kabupaten Bangli	
37	Kawasan Tempat Suci Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem	
38	Kawasan Tempat Suci Pura Lempuyang di Kabupaten Karangasem	
40	Kawasan Warisan Budaya Jatiluwih	KSP Kawasan Warisan Budaya
41	Kawasan Warisan Budaya Taman Ayun	
42	Kawasan Warisan Budaya DAS Tukad Pakerisan	
43	Kawasan Warisan Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan Sekitarnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung	
44	Kawasan Danau Batur dan Sekitarnya di Kabupaten Bangli	
45	Kawasan Danau Beratan - Buyan - Danau Tamblingan dan Sekitarnya di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng	

Sumber : No 3 Tahun 2020 tentang RTRWP

b. Rasio konektivitas layanan angkutan

Program Penyelenggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diampu oleh Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam upaya memenuhi rasio konektivitas layanan angkutan dengan mewujudkan transportasi yang lancar melalui pemantauan dan sosialisasi. Adapun kegiatan pendukungnya sebagai berikut :

- Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk pelaksanaan kegiatan pameran Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) pada Provinsi Bali di PKB 2023, pelaksanaan kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dengan anggaran sebesar Rp537.184.656,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp525.745.949,00 (97,87%), serta realisasi fisik (100%).

Penjelasan dalam perumusan perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Bali “Rasio konektivitas layanan angkutan” sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah KSP yang terlayani angkutan umum}}{\text{Jumlah KSP yang harus dilayani}}$$



Pelaksanaan Pameran KBLBB di PKB 2023 berlangsung pada tanggal 18 Juni 2023 sampai 16 Juli 2023. Peserta pameran terdiri dari ATPM, Distributor Kendaraan listrik di Bali, Bengkulu Kendaraan Listrik dengan jumlah 14 peserta. Pelaksanaan pameran dilakukan dengan membagi peserta menjadi 3 sesi yang masing-masing sesi berlangsung selama kurang lebih 10 Hari. Berikut tabel penjualan kendaraan listrik selama pameran :

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Stand Pameran Harian Sesi Pertama

Peserta	Tanggal Pameran pada Bulan Juni									Total Pengunjung
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Alva	250	300	130	100	167	243	254	279	203	1926
Gesit	120	70	50	70	49	39	38	13	39	488
Moseli 888	260	200	120	80	181	129	308	286	182	1746
Deux	170	180	100	150	153	101	125	151	146	1276
Total Harian	800	750	400	400	550	512	725	729	570	5436

Tabel 2. Jumlah Pengunjung Stand Pameran Harian Sesi Kedua

Peserta	Tanggal Pameran pada Bulan Juni dan Juli										Total Pengunjung
	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	
NIU	70	52	52	47	74	78	59	52	69	39	553
Selis	370	408	359	383	109	125	213	259	289	87	2515
Melalie	50	32	61	58	48	51	62	51	65	44	478
Electric Wheel	136	104	365	112	37	66	148	140	88	29	1196
United	85	105	165	69	77	93	132	199	76	102	1001
Total Harian	711	701	1002	669	345	413	614	701	587	301	5743

Tabel 3. Jumlah Pengunjung Stand Pameran Harian Sesi Ketiga

Peserta	Tanggal Pameran pada bulan Juli										Total Pengunjung
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Nas OTO	180	200	253	176	188	138	142	126	197	278	1878
GES	24	97	125	118	108	85	90	81	108	239	1075
Rodalink	18	59	159	57	129	69	88	89	158	139	965
EV Studio	23	35	178	38	59	17	19	29	109	37	544
Sentrik	64	116	147	145	107	100	75	77	102	97	1030
Total Harian	309	507	862	534	591	409	414	402	674	790	5492

c. Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM Program Penyelenggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diampu oleh Bidang Pelayaran dan UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan, yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam upaya memenuhi Persentase Pelabuhan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pengumpulan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM dengan mewujudkan transportasi yang lancar melalui koordinasi dan pengawasan. Adapun kegiatan pendukungnya sebagai berikut :

- Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional yang ditargetkan yakni Studi Amdal Pelabuhan Sangsit pada Bidang pelayaran juga mengawasi, membina dan mengendalikan jaringan trayek pelayaran dengan menggunakan perhitungan target dibandingkan dengan realisasinya, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini target sasaran yaitu jaringan pelayaran yang diawasi, dibina dan dikendalikan sebanyak 20 (dua puluh) jaringan dapat terealisasi bahkan melebihi. Dari target tersebut tercapai output sebanyak 20 (dua puluh) jaringan sehingga persentase capaiannya sebesar 100%. Bidang Pelayaran juga melaksanakan Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut, dimana dalam pelaksanaan kegiatan sasaran yang dicapai melebihi target, dimana Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut yang diawasi dan dibina sebanyak 50 (lima puluh) perusahaan. Pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp985.295.280,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp964.244.337,00 (97,86%), serta realisasi fisik (100%).
- Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam pengawasan pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional. Pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp7.190.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp7.150.000,00 (99,44%), serta realisasi fisik (100%).

Penjelasan dalam perumusan perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Bali “Persentase Pelabuhan Pengumpulan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM” sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Regional yang menerapkan SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Regional}} \times 100\%$$

d. Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali

Program ini diampu oleh UPTD. Trans Bali/Trans Sarbagita, yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam upaya memenuhi Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Bali dengan mewujudkan transportasi yang lancar melalui koordinasi dan pengawasan. Adapun kegiatan pendukungnya sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk penyediaan Angkutan Umum salah satunya Bus Sarbagita yang memiliki 2 koridor. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp17.461.485.088,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp7.538.323.441,00 (43,17%), serta realisasi fisik (100%).

Penjelasan dalam perumusan perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Bali “Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali” dari Skor indeks kepuasan hasil survey terhadap penumpang angkutan umum.

Transportasi angkutan jalan saat ini masih dihadapkan dengan kondisi rendahnya penggunaan angkutan umum dimana pangsa pasar angkutan umum masih jauh dibawah persentase ideal sebesar 70% dari total perjalanan. Hal itu terjadi karena selain masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum juga karena kurang tersedianya angkutan umum yang berkualitas.

Dari beberapa studi yang telah dilakukan dapat disampaikan bahwa kemacetan di Kota Denpasar dan sekitarnya dipicu oleh banyaknya penggunaan kendaraan pribadi, yang memiliki faktor muat sangat rendah, sehingga penggunaan ruang jalan menjadi tidak efisien. Disamping itu pula, pelayanan angkutan umum masih sangat buruk. Walaupun kini sudah dibangun jalan bebas hambatan Benoa – Ngurah Rai – Nusa Dua dan *underpass* Simpang Dewa Ruci yang diharapkan sebagai alternatif pemecah permasalahan transportasi kemacetan di wilayah Bali Selatan, tetapi karena pemusatan aktivitas pembangunan di Bali tetap dikembangkan (terpusat) di Wilayah Bali Selatan yaitu: Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA), maka permasalahan transportasi (baca kemacetan) tetap merupakan isu strategis bagi wilayah tersebut.

Untuk itu peningkatan pelayanan angkutan umum menjadi begitu penting untuk segera dibenahi, disamping juga peningkatan sarana prasarana yang telah ada seperti pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan disamping pembenahan terhadap penataan simpangan dan manajemen pengaturan lalu lintas sehingga terciptanya keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Mengingat keterbatasan daya dukung lingkungan, pembangunan transportasi di wilayah Bali Selatan perlu diarahkan pada strategi penataan dan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dengan konsep Terciptanya Lalu Lintas Yang Efisien



khususnya di wilayah perkotaan atau aglomerasi SARBAGITA melalui peningkatan angkutan umum massal.

Hal ini sesuai dengan amanat :

- Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 139 mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum orang dan barang. Penyediaan *Public Transport* (AKAP, AKDP, Angkutan Perkotaan/Perdesaan) yang *akuntable* menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maupun undang-undang sebelumnya mengamanatkan bahwa salah satu tujuan dari pemerintah daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, tugas pemerintah adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (publik) melalui program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pemerintah daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bahwa wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar dan Tabanan ditetapkan sebagai Kawasan Metropolitan SARBAGITA.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, yang menetapkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2018 tgl 31 Desember 2018 tentang layanan gratis angkutan umum Trans Sarbagita untuk pelajar/mahasiswa.
- MoU antara Kementerian Perhubungan dengan Gubernur Bali dan Walikota / Bupati di wilayah SARBAGITA tanggal 2 Desember 2010 tentang Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem Angkutan Umum di Wilayah SARBAGITA.
- MoU antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kepala Daerah di Wilayah SARBAGITA tanggal 21 Mei 2019 tentang Pelayanan Sistem Angkutan Umum di Wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA).

Pengoperasian angkutan umum Trans SARBAGITA yang telah di launching pada Bulan Agustus 2011 berlanjut hingga saat ini, dan dalam Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” akan terus memberikan pelayanan terbaik pada sector transportasi darat sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan penyediaan pelayanan angkutan umum yang memadai dan mampu berkontribusi mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan, meningkatkan keselamatan,



penghematan BBM untuk mendukung pencapaian visi “Terwujudnya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Handal (Aman, Nyaman, Tertib, Lancar, Efisien dan Terjangkau).

Dalam mewujudkan visi tersebut, telah disiapkan langkah-langkah sebagai misi yang harus diemban oleh Dinas Perhubungan yaitu :

Misi Pertama Meningkatkan pelayanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA sebagai implimentasi dari Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Misi kedua adalah Mengoptimalkan Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas melalui pembatasan penggunaan pribadi dan mampu memberikan prioritas bagi penggunaan angkutan umum.

Misi ketiga adalah Meningkatkan pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan visi dan misi tersebut diatas diharapkan mampu mengurangi secara bertahap penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan masyarakat mau beralih menggunakan Angkutan Umum Trans SARBAGITA sehingga dapat turut berkontribusi mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan.

Kinerja dari program Peningkatan Pelayanan Angkutan adalah Prosentase pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita yang ditarget sebesar 70%, dimana pada tahun 2022 Prosentase layanan yang baru dapat disediakan adalah sebesar 72,5%. Selain itu indikator lain yakni Load Factor penumpang juga dapat digunakan untuk mengukur efektivitas layanan. Dengan faktor muat bus (Load Factor) yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah penumpang dan perkapasitas yang disediakan maka dapat dipantau efektivitas layanannya apakah naik atau turun. Dalam load faktor idealnya berada diatas 70% .

Berdasarkan hasil survey terhadap IKM dengan mengambil 14 faktor penilaian pada kedua koridor Trans Sarbagita bahwa dengan responden sebesar 220 orang diperoleh nilai IKM sebesar 72,5 yang menunjukkan kinerja angkutan umum Trans Sarbagita masih tergolong SEDANG sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan rentang nilai 25,00 – 64,99 = BURUK, 65,00 – 76,60 = SEDANG, 76,61 – 88,30 = BAIK dan 88,31 – 100 = SANGAT BAIK. Kondisi ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu Tingginya waktu tunggu layanan di halte, rendahnya jangkauan pelayanan, rendahnya keterpaduan dengan dan intra moda angkutan. Dari sisi faktor muat (Load Factor), pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita masih menunjukkan nilai 32,80% masih dibawah LF ideal 70,00%, hal ini disebabkan pada tahun 2021 masih terdampaknya pandemic virus corona-19 yaaitu dengan dibatasinya kegiatan masyarakat.



Perkembangan kinerja operasional Angkutan Umum Trans SARBAGITA berdasarkan jumlah penumpang rata-rata per-hari dari tahun ke tahun tahun 2016 dengan pencapaian tertinggi yang mencapai 2.374 orang.

TABEL
JUMLAH PENUMPANG PER HARI

TAHUN	KORIDOR I	KORIDOR II	TOTAL
2011	(belum ada)	1.411	1.411
2012	915	1.566	2.481
2013	847	1.356	2.203
2014	888	1.361	2.249
2015	782	1.527	2.309
2016	838	1.536	2.374
2017	753	1.307	2.060
2018	451	486	937
2019	538	328	866
2020	180	662	842
2021	553	502	1.055
2022	2.860	852	3.712
2023	3.254	1.047	4.301

Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadinya penyebaran wabah Corona Virus (Covid-19) di Provinsi Bali dan seluruh dunia. Kebijakan Provinsi Bali terhadap penanganan penyebaran virus Covid-19 di Provinsi Bali sangat mempengaruhi jumlah penumpang yang menggunakan jasa Angkutan Umum Trans Sarbagita salah satunya kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang dapat mempengaruhi tingkat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum khususnya Bus Trans Sarbagita. Jika melihat data rekap diatas pada tahun 2021 hingga 2023 situasi sudah mulai membaik, sehingga membuat kenaikan signifikan terutama pada tahun 2021 ke 2022 sebanyak 2657 penumpang. Untuk koridor I dan II yang dikelola oleh UPTD Trans Sarbagita, pada tahun 2023 membukukan capaian *load factor* sebesar 23,85%.



TABEL LOAD FACTOR

TAHUN	LOAD FACTOR
2011	21,92%
2012	26,76%
2013	23,76%
2014	24,27%
2015	24,91%
2016	26,01%
2017	24,36%
2018	55,77%
2019	44,17%
2020	15,37%
2021	32,80%
2022	21,85%
2023	23,85%

Hubungan atau dampak dari perhitungan *Load factor* adalah sebagai bahan pertimbangan untuk menambah kapasitas, karena semakin meningkatnya *Load factor* maka terindikasi kapasitas mendekati maksimal. Bila dilihat dari sudut pandang pendapatan dari penjualan karcis/tiket bus Trans Sarbagita yang merupakan pendapatan dari jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, apabila kapasitas yang disediakan sama dan terjadi peningkatan *Load factor*, maka indikasi Pendapatan juga akan meningkat. atau berbanding lurus (pengecualian dari tahun 2019 diberlakukan kebijakan gratis untuk pelajar/mahasiswa).

Pendapatan per-tahun sejak dioperasikan dari tahun 2011 sd 2016 menunjukkan jumlah pendapatan operasional per-tahun yang terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 merupakan tahun dengan pencatatan pendapatan operasional tertinggi mencapai Rp.2.760.723.500. Namun jika dilihat dari data 3 tahun terakhir (2017, 2018 & 2019) kondisi ini mengalami perubahan dimana pada tahun 2017 mulai mengalami penurunan dengan pencatatan sebesar Rp.2.350.341.000 menurun pada tahun 2018 tercatat pencapaian sebesar Rp. 1.070.004.500, mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 sebesar Rp. 527.200.500 dan penurunan yang sangat drastis terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp. 112.017.500. Pendapatan Hasil Sewa BMD pada Bus sarbagita pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.025.000.000 dan pendapatan 2023 menurun menjadi Rp. 178.862.100 untuk hasil penjualan tiket bus.



TABEL
TOTAL PENDAPATAN

TAHUN	TOTAL
2011	620.012.500
2012	1.729.459.500
2013	2.543.417.500
2014	2.573.751.500
2015	2.658.709.500
2016	2.760.723.500
2017	2.350.341.000
2018	1.070.004.500
2019	527.200.500
2020	112.017.500
2021	46.704.000
2022	1.025.000.000
2023	178.862.100

Yang menjadi catatan sejak tahun 2023 seluruh koridor layanan angkutan Trans Sarbagita terbagi menjadi 4 layanan, baik sebelum Koridor I (Kota – GWK) dan Koridor II (Kota – Nusa Dua), kemudian tambahan khusus untuk Layanan Angkutan Umum Denpasar – Bangli dan Layanan Pendukung Angkutan Umum Trans Sarbagita yang berjalan mulai bulan Maret 2023. Penentuan tarif pada koridor I, II dan layanan pendukung Angkutan Umum Trans Sarbagita dikenakan Rp 3.500 bagi penumpang umum dan gratis bagi penumpang pelajar, lalu untuk layanan Angkutan Denpasar – Bangli belum dikenakan biaya tarif (gratis). Pelayanan angkutan umum trans sarbagita pada tahun 2023 dilaksanakan sampai dengan bulan agustus mengingat adanya rasionalisasi anggaran pada tahun 2023 dan adanya beberapa sub kegiatan yang mengalami gagal lelang membuat persentase realisasi keuangan kegiatan teknis sarbagita pada UPTD. Trans Bali/Trans Sarbagita rendah.



1.3. Sasaran Keempat “Terwujudnya Transportasi yang Berkeselamatan”

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2023		PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Transportasi berkeselamatan	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	72,51%	72,51%	Program : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan: Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%

Indikator Kinerja dari Sasaran Terwujudnya Transportasi yang Berkeselamatan adalah Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan

Indikator kinerja: Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan

Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran tahun 2023 ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diampu oleh Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang terbagi kedalam 3 Seksi yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam upaya memenuhi Standar Pelayanan Minimum angkutan dengan sasaran terwujudnya transportasi yang berkeselamatan melalui koordinasi dan sinkronisasi pengawasan. Adapun kegiatan pendukungnya sebagai berikut:

- Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk mengawasi pelaksanaan penerbitan izin dalam penyelenggaraan pada angkutan orang pada setiap trayek lintas baik dari Daerah maupun lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, agar bagi penyelenggara angkutan orang dalam trayek tersebut dapat memenuhi persyaratan perizinan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pelaksanaan kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp31.721.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.24.569.400,00 (77,45%), serta realisasi fisik (100%).

- Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk memfasilitasi pemenuhan dalam persyaratan penerbitan izin dalam penyelenggaraan pada angkutan taksi pada setiap trayek lintas baik dari Daerah maupun lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, agar memenuhi ketentuan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi dalam trayek.

Pelaksanaan kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp181.955.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.169.260.000,00 (93,02%), serta realisasi fisik (100%).

1.4. Sasaran Keempat “Terwujudnya Transportasi yang Berkeselamatan”

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2023		PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya akuntabilitas capaian kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100%	100%	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Indikator Kinerja dari Sasaran Terwujudnya akuntabilitas capaian kinerja adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja

Indikator kinerja: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja

Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran tahun 2023 ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini diampu oleh seluruh Bidang maupun UPTD dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, yang terbagi pada **Sekretariat** (Sub.Bagian Umum Kepegawaian, Sub.Bagian Keuangan, dan Sub.Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan), **Bidang** (Angkutan Jalan, Lalu Lintas Jalan, Pelayaran, dan Keterpaduan Moda), dan **UPTD** (Pusat Pengendalian LLAJ, Perlengkapan Jalan, Trans Bali/Trans Sarbagita, dan Penyelenggaraan Pelabuhan) yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam upaya memenuhi Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja melalui koordinasi dan sinkronisasi pengawasan. Pelaksanaan kegiatan masing-masing Bidang maupun UPTD. pada tahun 2023 dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp24.859.878.717,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.23.499.961.074,00 (94,53%), serta realisasi fisik (100%).

C. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PELAKSANAAN PROGRAM

Sesuai dengan kinerja utama Provinsi Bali, terdapat beberapa program prioritas dan unggulan yang menjadi catatan pada tahun 2023. Dinas Perhubungan Provinsi Bali pada tahun 2023 memiliki Program peningkatan layanan angkutan Trans Sarbagita yang masih berlanjut dengan kebijakan gratis untuk pengguna pelajar dan mahasiswa, Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Pelayaran yang didalamnya terdapat beberapa kajian untuk rencana (Amdal pelabuhan Sangsit).

Keberhasilan program tidak terlepas daripada dukungan dari segenap unsur baik Pemerintah selaku regulator maupun Pengusaha dan Masyarakat pengguna. Perlunya analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi sangat penting untuk kesuksesan program ini selain dukungan daripada Pemerintah dalam bentuk anggaran untuk menunjang program. Adapun beberapa gambaran atas permasalahan maka dapat kami uraikan sebagai berikut:

- Dalam pelaksanaan program Layanan Trans SARBAGITA dengan melihat kondisi layanan maka permasalahannya sebagai berikut:

Hingga akhir tahun 2023 rencana untuk menambah operasional koridor baru belum dapat terealisasi mengingat terbatasnya anggaran, sehingga dampaknya masyarakat masih



kesulitan mengakses layanan Trans Sarbagita secara terintegrasi, trayek pengumpan yang masih tersisa juga tidak berfungsi maksimal, kecenderungan Load Faktor masih rendah, subsidi masih tinggi dan opini buruk terhadap layanan.

➤ **Pelaksanaan Program Infrastruktur**

Pada tahun 2023 dilakukan pengkajian terhadap rencana infrastruktur transportasi Bali. Beberapa kajian telah dilaksanakan baik pada APBD induk maupun pada APBD Perubahan. Kajian Amdal pelabuhan Sangsit, Yang menjadi catatan dimana dengan selesainya dokumen ini diharapkan adanya dukungan lanjutan dalam perencanaan fisik dan pembangunan kedepan.

➤ **Manajemen Rakayasa Lalu Lintas**

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan melaksanakan kegiatan Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan provinsi masih belum maksimal dapat membantu pemecahan masalah kemacetan lalu lintas di Bali. Dukungan kajian masih dibutuhkan untuk dapat mengevaluasi kinerja ruas jalan serta persimpangan untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam merekayasa lalu lintas di Provinsi Bali.

➤ **Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban terhadap pelanggaran perijinan angkutan orang dan barang dengan kegiatan pengawasan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Provinsi**

Masih tingginya angka pelanggaran menunjukkan masih belum efektifnya usaha yang telah dilakukan dan dibutuhkan inovasi agar pengusaha dan masyarakat dapat lebih percaya terhadap Pemerintah.

➤ **Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang menjadi fokus pemerintah dengan melaksanakan kegiatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), kegiatan KBLBB melaksanakan pameran di PKB 2023 yang sudah terdata dari jumlah pengunjung harian yang berkunjung ke lokasi pameran di atas maka terdapat penjualan kendaraan listrik yaitu berupa sepeda listrik dan motor listrik selama pameran di PKB 2023. Berikut tabel penjualan kendaraan listrik selama pameran:**

Total Penjualan Kendaraan Listrik dari setiap Peserta

Peserta	Penjualan Kendaraan Listrik		Total
	Sepeda Listrik	Motor Listrik	
Alva	0	11	11
Gesit	0	1	1
Moseli 888	60	0	60
Deux	1	2	3
NIU	0	0	0
Selis	4	2	6
Melalie	0	0	0

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2023



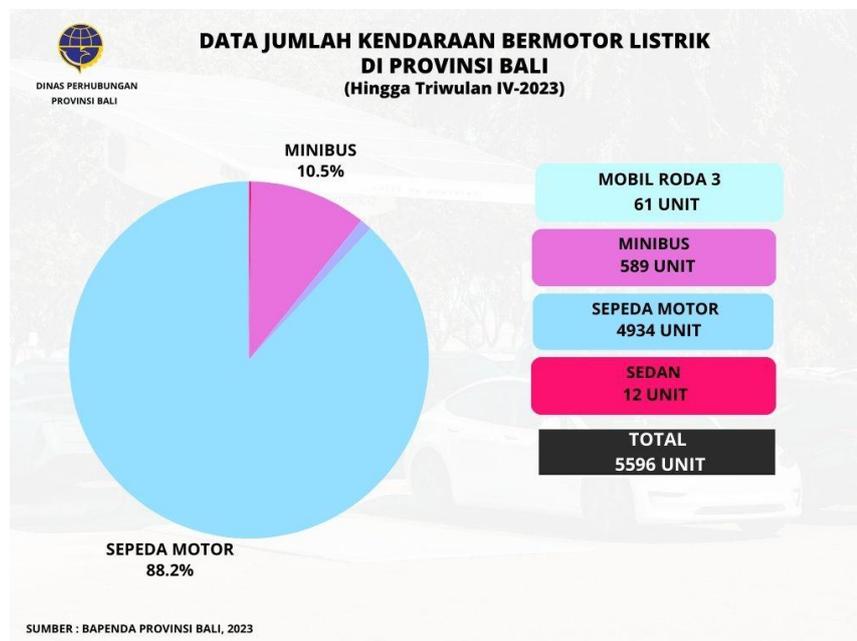
Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Peserta	Penjualan Kendaraan Listrik		Total
	Sepeda Listrik	Motor Listrik	
Electric Wheel	0	0	0
United	0	0	0
Nas OTO	0	0	0
GES	0	3	3
Rodalink	0	0	0
EV Studio	0	0	0
Sentrik	0	0	0
Total	65	19	84

Hingga akhir Tahun 2023, jumlah pengguna KBLBB di Provinsi Bali sebanyak 5596 unit yang terdiri dari 4934 unit sepeda motor, 589 unit minibus, 61 unit mobil roda 3, dan 12 unit sedan.



Analisis permasalahan dan solusi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali secara umum dapat kami sampaikan sebagai berikut:

a. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dialami dalam melaksanakan urusan Perhubungan adalah :

1. Masih minimnya dukungan pendanaan dari Pemerintah baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap penyediaan angkutan masal di Provinsi Bali.
2. Masih minimnya infrastruktur transportasi publik terintegrasi di Provinsi Bali. Hal ini dapat dilihat dari belum terkoneksi dengan baik beberapa simpul transportasi baik darat dan laut.



3. Kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan yang masih kurang, meskipun telah dilaksanakan beberapa kali sosialisasi dengan target yang berbeda-beda tetapi masih ada target yang belum bisa tersentuh yang diakibatkan karena keterbatasan anggaran.
 4. Fungsi pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran berlalu lintas belum optimal bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran untuk melaksanakan survey-survey dengan tingkat prioritas lalu lintas berkeselamatan yang diharapkan yaitu *zero accident*.
 5. Belum seragamnya penegakan hukum pelanggaran operasional angkutan barang menyebabkan masih banyaknya kendaraan angkutan barang yang melanggar dimensi, tata cara pemuatan maupun daya angkut yang diijinkan.
 6. Penggunaan angkutan umum yang masih rendah.
- b. Solusi yang dapat ditempuh antara lain :
1. Perlunya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait sinkronisasi perencanaan program di Bidang Transportasi sehingga dapat bersinergi dalam menghasilkan program yang selaras baik dari tingkat Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta tertata dari segi penyiapan pendanaan/anggaran. Dengan demikian diharapkan program dapat terbiayai dengan berjalan dengan baik.
 2. Merealisasikan dan atau menindak lanjuti dari kajian Masterplan Transportasi Terintegrasi Provinsi Bali terkait rencana apa yang akan dilakukan kedepan dan dapat menjadi prioritas untuk diselesaikan secara bertahap.
 3. Perlu sosialisasi dan pertemuan terhadap seluruh stake holder perhubungan sehingga seluruh regulasi dapat dipahami dengan baik.
 4. Diperlukan kajian terhadap Manajemen Rekayasa Lalu Lintas secara menyeluruh di Provinsi Bali sehingga dapat ditentukan prioritas penanganan dan skala pembiayaan. Hingga saat ini keterbatasan SDM juga menjadi hambatan sehingga dibutuhkan SDM yang benar – benar merupakan SDM di Bidang Transportasi Darat.
 5. Perlu adanya keseragaman penerapan sanksi hukum atas pelanggaran operasional angkutan barang dibawah koordinasi Kementerian Perhubungan.

Sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2023 antara Bapak Kepala Dinas dengan Bapak Gubernur maka anggaran induk yang dikelola untuk mendukung kinerja dinas pada program dan kegiatan sebagai berikut:



No	Nama Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Rp. 23.677.659.937,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 23.051.884.461,00	APBD
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 1.010.768.040,00	APBD
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 758.242.788,00	APBD
	Jumlah anggaran	Rp. 48.498.555.226,00	

Sejalan dengan perkembangan anggaran pada tahun 2023 terjadi pengurangan dan pergeseran anggaran pada perubahan APBD tahun 2023 dikarenakan rasionalisasi dan pengendalian belanja daerah pada Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran induk	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Rp 23.677.659.937,00	Rp 24.859.878.717,00	Rp 23.499.961.074,00	94,53%
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 23.051.884.461,00	Rp 22.204.594.156,00	Rp 11.510.745.727,00	51,84%
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 1.010.768.040,00	Rp 992.485.280,00	Rp 971.394.337,00	97,87%
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 758.242.788,00	Rp 252.894.476,00	Rp 245.432.552,00	97,05%
	Jumlah anggaran	Rp 48.498.555.226,00	Rp 48.309.852.629,00	Rp 36.227.533.690,00	74,99%

Tabel Alokasi Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Anggaran pada tahun ke-				
2019 (perubahan)	2020 (perubahan)	2021 (perubahan)	2022 (perubahan)	2023 (perubahan)
16.158.372.701	12.921.291.473	26.895.197.905	30.439.092.618	48.309.852.629

Realisasi Anggaran pada tahun ke-				
2019	2020	2021	2022	2023
23.561.265.601	13.964.825.658	15.215.725.499	29.140.860.463	36.287.151.007



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Ratio Serapan antara Realisasi dan Anggaran

Ratio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				
2019	2020	2021	2022	2023
94,17	91,12	92,94	95,73	75,11

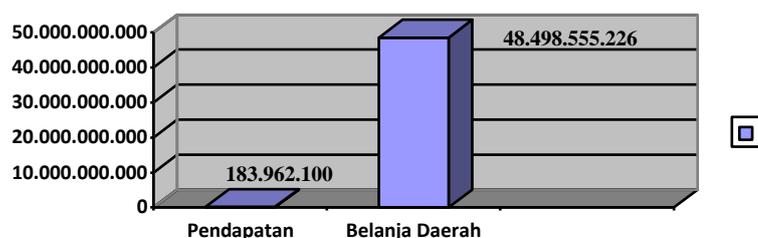
Persentase Pertumbuhan Anggaran

Rata - rata pertumbuhan				
2019	2020	2021	2022	2023
6,91%	-20,03%	108,15%	13,18%	58,71%

Dengan kebijakan anggaran di tahun 2023 dimana Belanja Langsung (BL) di masukan dalam DPA perangkat daerah maka anggaran di Dinas Provinsi Bali mengalami kenaikan. Dengan kebijakan tersebut anggaran sebesar Rp. 48.498.555.226 terdiri dari Belanja Langsung. Anggaran yang telah ditentukan oleh Tim Pendapatan dan Anggaran Pemerintah Provinsi Bali anggaran untuk pelaksanaan kegiatan atau belanja langsung mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 pada tahun tersebut, akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya mulai stabil dan mengalami kenaikan hingga pada tahun ini (2023) Dinas Perhubungan Provinsi Bali tetap konsisten melaksanakan seluruh kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi terus dilaksanakan sehingga pencapaian kinerja tetap dilaksanakan dengan maksimal.

PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2023

REKAPITULASI BELANJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI DALAM APBD TAHUN 2023



Total Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali sebesar Rp. 48.498.555.226 (terdiri belanja pegawai dan belanja untuk kegiatan)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

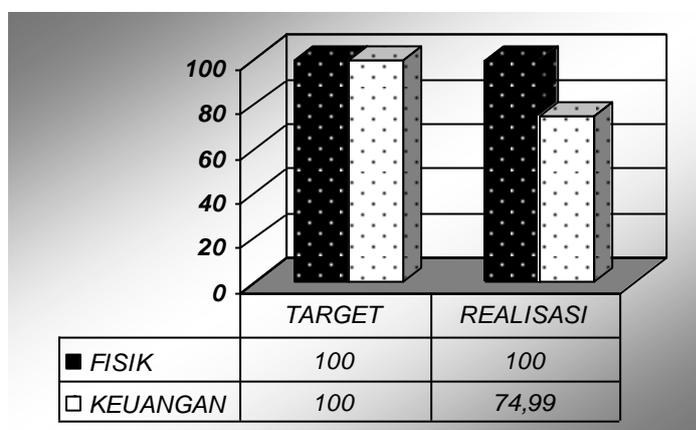


Dinas Perhubungan Provinsi Bali terdiri atas 4 Program yang diampu oleh 4 Bidang dan 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Pada tahun 2023 Total Anggaran Belanja yang dikelola sebesar Rp. 48.498.555.226 untuk membiayai 4 Program dengan rekapitulasi sebagai berikut sebagai berikut:

No	Nama Bidang	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Bidang Sekretariat	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	6	23.677.659.937,00	
2.	Bidang Angkutan Jalan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	6	23.051.884.461,00	
3.	Bidang Lalu Lintas Jalan				
4.	UPTD Pusat Pengendalian LLAJ				
5.	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita				
6.	UPTD Perlengkapan Jalan				
7.	Bidang Keterpaduan Moda	Pengelolaan Perkeretaapian	1	758.242.788,00	
8.	Bidang Pelayaran	Pengelolaan Pelayaran	2	1.010.768.040,00	
9.	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan				
Jumlah			15	48.498.555.226,00	

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2023



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Capaian/realisasi total dari pelaksanaan 4 Program dan 15 Kegiatan

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam mencapai Tujuan Strategis yang telah ditetapkan, maka disusun suatu Indikator Kinerja dan Target Kinerja Sasaran yang ditargetkan terdiciapai pada akhir tahun (2023). Indikator kinerja masing-masing Tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	50
Terwujudnya transportasi yang lancar	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	65%
	Rasio konektivitas layanan angkutan	0,84
	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50%
	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	79
Terwujudnya transportasi yang berkeselamatan	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	72,51
Terwujudnya akuntabilitas capaian kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84

Sasaran Strategis dan INDIKATOR KINERJA SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan indikator sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya. Dalam penetapan sasaran strategis diperlukan Rencana Kerja Tahunan yang dialokasikan dalam 5 (lima) periode berdasarkan kebijakan yang berlaku dengan menyusun program/kegiatan, sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi pada sampai akhir kurun waktu 5 (lima) tahun.



Sasaran Strategis sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya bahwa penjabaran dari apa tujuan strategis yang terkait sehingga diharapkan pula sasaran strategis telah dapat dicapai. Sasaran strategis pada Dinas Perhubungan, Provinsi Bali yang mendukung dalam pelaksanaan pembangunan daerah tersusun dalam rencana/kegiatan pengembangan jaringan sarana dan prasarana transportasi yang lebih selektif sesuai dengan potensi daerahnya.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada masing-masing misi dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dapat dijabarkan lebih spesifik adalah sebagai berikut:

Tujuan Dinas Perhubungan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan 2018-2023 adalah Terwujudnya Transportasi yang Handal dengan didukung beberapa sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai

SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2
Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	1.1. Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan

2. Terwujudnya Transportasi yang lancar

SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2
Terwujudnya Transportasi yang lancar	2.1. Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional 2.2. Rasio konektivitas layanan angkutan 2.3. Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM 2.4. Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3. Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan

SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2
Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	3.1. Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan

4. Terwujudnya akuntabilitas capaian kinerja

SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2
Terwujudnya akuntabilitas capaian kinerja	4.1. Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja

Selanjutnya untuk mencapai sasaran strategis maka perlu ditunjang oleh pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan.

Penetapan program dan kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2023		
Terwujudnya akuntabilitas capaian kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,85%	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2023		
Terwujudnya Transportasi yang lancar	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	65%	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
	Rasio konektivitas layanan angkutan	0,84		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	79		Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2023		
Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	72,51%	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3. Program Pengelolaan Perkeretaapian

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2023		
Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	50%	Pengelolaan Perkeretaapian	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



4. Program Pengelolaan Pelayaran

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2023		
Terwujudnya Transportasi yang lancar	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50%	Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Pembangunan, Penerbitan izin Pembangunan dan Pengeoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab diatas, dapat kami simpulkan bahwa;

- a. Dinas Perhubungan dibentuk untuk dapat membantu mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan permasalahan sektor perhubungan.
- b. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2018-2023, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan antara Bapak Kepala Dinas Perhubungan terakhir dengan Bapak Gubernur Bali pada tanggal 2 Januari 2023. Yaitu :

Indikator Kinerja Utama	Target
Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	50%
Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	65%
Rasio konektivitas layanan angkutan	0,84
Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50%
Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	79
Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	72,51%
Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84

- c. Hasil Akuntabilitas :

Capaian Kinerja Organisasi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Renstra SKPD Tahun 2023		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
1	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	50	50	100%
2	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	65%	65%	100%
3	Rasio konektivitas layanan angkutan	0,84	0,84	100%
4	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50%	50%	100%

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2023



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Renstra SKPD Tahun 2023		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
5	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	79	81,59	103%
6	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	72,51%	72,51%	100%
7	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	83,87	99,84%

Efektivitas anggaran

Pelaksanaan penggunaan alokasi anggaran perubahan yang tersedia pada tahun 2023 sebesar Rp. 48.309.852.629,00 Telah dilaksanakan secara efektif yaitu sesuai target volume dan sasaran spesifikasi fisik jenis barang yang direncanakan, telah dilaksanakan secara efisien yaitu harga yang wajar sesuai kualitas barang, jasa dan harga pasar, transparan sesuai acuan, pedoman, kriteria, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.227.553.690,00 atau 74,99%.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali terdiri atas 1 Sekretariat, 4 Bidang dan 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pada tahun 2023 Total Anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 48.309.852.629,00 untuk membiayai 4 Program pendukung dengan 15 Kegiatan didalamnya yang tersebar di Sekretariat, Bidang dan UPTD. dengan rekapitulasi secara sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran induk	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Rp 23.677.659.937,00	Rp 24.859.878.717,00	Rp 23.499.961.074,00	94,53%
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 23.051.884.461,00	Rp 22.204.594.156,00	Rp 11.510.745.457,00	51,84%
3.	Program Pengelolaan Pelayanan	Rp. 1.010.768.040,00	Rp 992.485.280,00	Rp 971.394.337,00	97,87%
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 758.242.788,00	Rp 252.894.476,00	Rp 245.432.552,00	97,05%
	Jumlah anggaran	Rp 48.498.555.226,00	Rp 48.309.852.629,00	Rp 36.227.553.690,00	74,99%



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2. SARAN

Dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan bidang Perhubungan diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait untuk sinergitas pelaksanaan program, utamanya dalam pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan sosialisasi dan pameran terhadap Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk meningkatkan daya tarik ke masyarakat.
2. Dipandang perlu terus dilaksanakan koordinasi secara intensif agar kedepannya menjadi pedoman dalam penetapan arah kebijakan, acuan dan pedoman bagi instansi terkait dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pengawasan sesuai kewenangan, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan target fisik sarana, prasarana dan waktu.
3. Untuk mengantisipasi permasalahan kegiatan pengadaan barang dan jasa, maka penyusunan dokumen teknis, administrasi dan biaya dipersiapkan dan dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan instansi / pihak terkait sebelum kegiatan diusulkan.
4. Untuk meningkatkan kelancaran dan profesionalisme kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pembinaan dan penertiban pelayanan dan operasional serta pengendalian dan penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan, maka kualitas teknis fungsional aparatur perlu terus ditingkatkan melalui program pendidikan dan latihan teknis fungsional dan PPNS bidang Perhubungan.

Selain tersebut diatas, untuk menunjang sasaran reformasi birokrasi maka Dinas Perhubungan Provinsi Bali melaksanakan:

1. Meningkatkan mental aparatur dan melakukan manajemen perubahan
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tupoksi masing-masing aparatur
3. Meningkatkan akuntabilitas sehingga seluruh kinerja dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan dengan menyesuaikan seluruh kinerja yang dilaksanakan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Meningkatkan Tata Laksana dalam seluruh proses pelayanan kepada aparatur dan masyarakat luas
6. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara
7. Mendasari seluruh pelaksanaan pelayanan dan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi dan kewenangan.



LAMPIRAN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr.Ir. I GDE WAYAN SAMSI GUNARTA, M.Appl.Sc

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAYAN KOSTER

Jabatan : GUBERNUR BALI

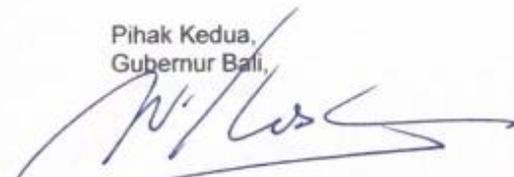
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Gubernur Bali,



WAYAN KOSTER

Bali, 2 Januari 2023
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali,



Dr.Ir. I GDE WAYAN SAMSI GUNARTA, M.Appl.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196508071996031002
A



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

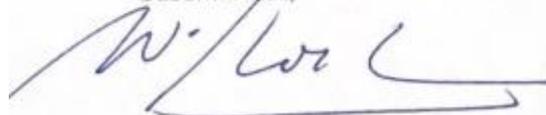


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Terwujudnya Sistem Transportasi yang berkelanjutan	Persentase lintasan keretaapi wilayah Sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	50
Terwujudnya Transportasi yang Lancar	Persentase pencapaian waktu tempuh 2.5 jam/100km dari KSP menuju jalan nasional	65
	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan	72,51
	Rasio konektivitas layanan angkutan	0,84
	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	79
Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM	50
Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 23.677.659.937	APBD
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 23.051.884.461	APBD
3. Program Pengeloan Pelayaran	Rp. 1.010.768.040	APBD
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 758.242.788	APBD
Jumlah Anggaran	Rp. 48.498.555.226	

Pihak Kedua,
Gubernur Bali,



WAYAN KOSTER

Bali, 2 Januari 2023
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali,



Dr. Ir. I GDE WAYAN SAMSI GUNARTA, M.Appl.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650807-199603 1 002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN (sesuaikan dengan Narasi: Bidang Prioritas..... Dan sasaran.....)	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA			
	Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Bali	Bidang Penguatan Infrastruktur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	24.859.878.717	100%	23.499.961.074	100%	Adanya kebijakan Daerah terkait Rasionalisasi Anggaran Tahun 2023, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana awal 2023.	Melaksanakan dan atau mengutamakan Kegiatan Dinas sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah.	
1			Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	30.779.900	100%	8 dokumen	24.123.500	100%	8 dokumen	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	16.582.630.200	100%	2 dokumen	16.016.049.003	96,58	2 dokumen	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Perkantoran	1.321.639.760	100%	6 dokumen	1.050.338.678	79,47	6 dokumen	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.486.360.800	100%	2 dokumen	3.247.190.000	93,14	2 dokumen	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	726.728.201	100%	3 dokumen	704.733.296	96,97	3 dokumen	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Administrasi Perkantoran	2.711.739.856	100%	3 dokumen	2.457.526.597	90,63	3 dokumen	



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN (sesuaikan dengan Narasi: Bidang Prioritas..... Dan sasaran.....)	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						KEUANGAN	KINERJA		KEUANGAN	KINERJA				
	Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Bali	Bidang Penguatan Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		21.990.917.256	100%		11.316.916.327	51,46				
2			Terwujudnya Transportasi yang lancar	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Provinsi	Persentase pencapaian w aktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	2.191.562.076	100%	100 persen	1.696.795.216	77,42	100 persen			
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalain) untuk jalan Provinsi	Persentase pencapaian w aktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	19.883.100	75%	100 persen	11.965.610	60,18	100 persen			
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rasio konektivitas layanan angkutan	537.184.656	100%	5 laporan	466.128.632	86,77	5 laporan			
				Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase pencapaian w aktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	1.780.802.336	100%	100 persen	1.603.703.428	90,06	100 persen			
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	17.461.485.088	100%	4368 RIT	7.538.323.441	43,17	4368 RIT			
				Program Pengelolaan Pelayaran		992.485.280	100%		971.394.337	97,87				
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	985.295.280	100%	1 dokumen	964.244.337	97,86	2 dokumen			
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional / Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	7.190.000	100%	1 dokumen	7.150.000	99,44	1 dokumen			



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN (sesuaikan dengan Narasi: Bidang Prioritas..... Dan sasaran.....)	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						KEUANGAN	KINERJA		KEUANGAN	KINERJA				
	Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Bali	Bidang Penguatan Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		213.676.900	100%		193.829.400	90,71				
3			Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	31.721.200	100%	1 laporan	24.569.400	77,45	1 laporan			
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	181.955.700	100%	3000 unit	169.260.000	93,02	3000 unit			
			Bidang Penguatan Infrastruktur	Program Pengelolaan Perkeretaapian		252.894.476	100%		245.432.552	97,05				
4			Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	252.894.476	100%	1 dokumen	245.432.552	97,05	1 dokumen			



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

